

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI -Press, 1984.
- A. Salman Maggalatung. *Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Dan Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Focus GrahaMedia, 2012.
- Abdul Wahid. *Politik Penegakan Hukum Pidana Terhadap Corporate Crime Yang Berbasis Egalitarianisme” Dalam Tim Mohammad Saihu, Ed., Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif, Cetakan Pertama*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2011.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: PenerbitToko Gunung Agung, 2002.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Benny K. Harman. *Negeri Mafia Republik Koruptor “Menggugat Peran DPR Reformasi.”* Yogyakarta: Lamalera, 2012.
- Bibit S. Rianto. *Korupsi Go To Hell*. Bandung: Mizan Publica, 2009.
- BPKP. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Deni Seryawati. *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Gunawan A. Tauda. *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.

- Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Henry Priono. *Korupsi (Melacak Arti, Menyimak Implikasi)*. Jakarta: PT. Gramedia, 2018.
- I Gusti Ketut Ariawan. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Bali: Universitas Udayana, 2015.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Assiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cet, II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi) KPK Cet. II*. Jakarta, 2006.
- Mahmuddin Muslimin. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerak, 2004.
- Marzuki, peter mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kesatu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rizky Argama. “Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu.” Universitas Indonesia, 2007.
- Roestandi, Ahmad. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pthaem, 1986.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi I*. Jakarta:

Rajagrafindo Persada, 2007.

Sri Soemantri. "Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945,." In *Makalah Proseeding Diskusi Publik*, 50. Jakarta: Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Elfabeta, 2007.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sukarton Marmosudjono. *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila, Cetakan Pertama*. Tanpa Kota: Pustaka Kartin, 1989.

Winardi, Sirajuddin dan. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

## JURNAL

Agustine, O V, E M Sinaga, and R Yulistiyaputri. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Legal Politics of the Strengthening of Authority in the Constitutional System." *Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 314–338.

Alamsyah, Wana, Lais Abid, and Agus Sunaryanto. "Laporan Kegiatan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018." *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2018): 1–33. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan\\_tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_2018.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf).

Angraeni, Ananda Nurafifah. "Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Fishing Di Kabupaten Raja Ampat Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 52–61.

Argandoña, Antonio. "The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies." *Journal of Business Ethics* 74, no. 4 (2007): 481–496.

Asyari, Fatimah. "Operasi Tangkap Tangan (OTT) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum." *Legalitas* 2, no. 1 (2017): 57–66.

Ayon Diniyanto. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Pengawasan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 9 (2019): 13.

Barizki, Rezzi Nanda, and Mayang Riyantie. "Konstruksi Realitas Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberitaan Media Online." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 3, no. 1 (2021): 68.

BEM UNDIP. “Upaya Pelemahan Dan Catatan Permasalahan KPK.”

Bukido, Rosdalina. “Paradigm and Reality of Law Enforcement.” *Jurnal Ilmiah Al Syir’ah* 4 (2006): 11. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/214>.

Cahyaningsih, Diana Tantri. “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot.” *RechtsVinding* (2020): 1–7.

Dewi, Widya Parameswari Resta, Anak Agung Istri Ari Atu. “LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Kerta Wicara* (n.d.): 1–15.

Faruq, U. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ...” *Unizar Law Review* 3, no. 1 (2020): 50–65. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/45552>.

Firmansyah Arifin Et, All. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*. Edited by Doni Tjiptonugroho. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.

Frisca Tyara M Fanhar. “Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Operation.” *CORRUPTIO* 01, no. 2 (2016): 1–23.

Indriyanto Seno Adji, Denny Indrayana, Arif Setiawan, Bambang Widjojanto, M. Nur Sholikin. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2016.

Kosanke, Robert M. “KEDUDUKAN OERASI TANGKAP TANGAN (OTT) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI,” no. 4 (2019): 1–18.

Kusmana, Lalu Dhedi, Lalu Dhedi, Kusmana Penerapan, Asas-asas Umum Pemerintahan, and Yang Baik. “Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur Implementation of the General Principles of Good Governance in Issuing Licenses in the Regency of East” (2013): 576–600.

M.Syamsudin. “Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum.” *Jurnal UNISIA* Vol. XXXNo, no. 30 (2007).

Moh. Syaifuddin Wahid. “Kewenangan Kepala Daerah Dalam Menjalankan Tugasnya.” *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah* 21 (2021): 33.

## WEBSITE

Indonesia Corruption Watch. “Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.” *Indonesia Corruption Watch* (2021): 1–40.

Mudzakkir. “Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi.” *Bphn* (2011): 11–14

- “51 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Terlengkap.” Accessed July 20, 2022. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>.
- “65 Persen Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani KPK Merupakan Kasus Penyuapan.” Accessed May 22, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/65-persen-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-merupakan-kasus-penyuapan>.
- “Belajar Dari Kegagalan TGPTPK.” Accessed May 22, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kegagalan-tgptpk-hol3295>.
- “Gelar Perkara Dan Seluk Beluknya - Klinik Hukumonline.” Accessed January 31, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya-lt582d807d2f16c>.
- “Ini Daftar Lengkap 19 OTT KPK Sepanjang 2017 | Republika Online.” Accessed June 23, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/p1vv1h409/ini-daftar-lengkap-19-ott-kpk-sepanjang-2017>.
- Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat,” n.d. Accessed July 2, 2022. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- “Operasi Tangkap Tangan.” Accessed January 21, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan>.
- “Tahukah Anda, Hak Orang Tertangkap Tangan Beda Dengan Tersangka.” Accessed February 27, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahukah-anda--hak-orang-tertangkap-tangan-beda-dengan-tersangka-lt56c6f109c8941>.
- “Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani KPK - Kompas.Id.” Accessed May 22, 2023. [https://www.kompas.id/baca/kompas\\_multimedia/tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk](https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk).
- “Trias Politica Menurut Montesquieu.” Accessed June 22, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/01000001/trias-politica-menurut-montesquieu>.

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Dasar 1945

UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional,” no. 1 (2011): 1–155.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.